

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Bahri, S. (2022). *Internal Auditing*. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance* (Edisi 2). Jakarta : Selemba Empat.
- Elsye, R. et all. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gurjati. (2012). *Dasar-Dasar Econometrika*. Jakarta : Selemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta : Selemba Empat.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Pernada Media.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta : CV . Andi Kayo.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Pertama). Jakarta
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang : UB Press.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta : UI Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketiga). Yogyakarta : UPP STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung : Refika Aditama.

- Nurul Latifah. (2021). *Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal*. Sumatera Barat : Insan Cendekiawan Mandiri.
- Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Daerah*. Jakarta : ANI.
- Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan : Brama Ardian.
- Rochmansjah, S. dan. (2015). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung : Fokusmedia.
- Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, dan M. (2017). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Jakarta : Selemba Empat.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta CV.
- Sujarweni. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Surdayana, B. & A. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sleman : DEEPUBLISH.
- Suwanda. (2017). *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jakarta : PMM Manajemen.
- Untung, A. S. dan E. (2016). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta : Grasindo Kariyoto.

Sumber Jurnal:

- Aliyah, Siti ; Nahar, A. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Siti Aliyah Aida Nahar. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97–189.
- Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218.
- Asfiryati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *JOM Fekon*, 4(1), 1986–1999.
- Asmawanti-S, D., Hermadisya, G., Sari, N., & Fitranita, V. (2022). Persepsi Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Auliyah, I., & Papua, U. Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Jayapura. 6(29), 41–53.
- Azizah, N., -, J., & Setiawan, A. R. (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 1(2), 111.
- Bakhtiar, B. (2021). *Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance*. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245.
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21.

- Hehanussa, S. J. (2015). 170559-ID Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. 82–30.
- Ichalina, F., & Handayani, N. (2019). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1–16.
- Joushan, Shindie Aulia , Syamsul, Muhammad , Kartika, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi dan *Employee Engagement* terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN (Persero) Area Bekasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(66), 697–703.
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). *The Effect Of The Presentation Of Financial Statment And Accessibility Financial Statment On Regional Financial Management Accountability (Case Study in Mataram City Regional Secre). Management*, 6(1), 705–714.
- Leatemia & Usmany. (2021). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Penngelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Mansyuer, T. Y., dan Efendi, D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Paramayana, A. N., Dewi, R. R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Owner*, 6(4).
- Purba, M., Agusti, R., & Rofika, R. (2021). Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(3), 418–434.
- Puspitawati, L., & Effendy, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi*

Government Dalam Demokrasi, 9(1), 43–58.

- Putri. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau) Oleh : Firstcilia Eldy Putri Pembimbing : Yuneita Anisma dan Al Azhar A. 32.
- Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, 4(2).
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 14–23.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2013 - *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 1–20.
- Santika. (2021). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah : Peran Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Current Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 438–457.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOMFekom*, 4(1), 571–586.
- Saripujiana, D., & Suriana, I. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Terapan*, 355–359.
- Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Superdi. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *JOMFekom*, 4(1), 205–2019.
- Wahida. (2015). JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017 2015 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung). *JOMFekom*, 4(1), 205–2019.
- Wulansari, A. D. (2014). Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran *Student Teams Achievement Divisions* dan *Team Assisted Individualization* Pada Materi Regresi Linear.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.

Peraturan Pemerintah

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 1 ayat 14 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber Internet

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2023 BPK RI. Tersedia: <https://www.bpk.go.id/ihps>

Warta Pemeriksa. 2022. IHPS 1 2022 Ungkap 9.158 Temuan. Tersedia: https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-9-vol-v-september-2022_warta_pemeriksa_1666913058.pdf

Annasa Rizki Kamalina & Feni Freycinetia Fitriani. 2023. BPK Soroti Masalah di 11 BUMN, PLN Boncos Rp 5,69 Triliun. Tersedia: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231205/9/1721056/bpk-soroti-masalah-di-11-bumn-pln-boncos-rp569-triliun>

Novita Intan. 2023. Laporkan IHPS 1 2-23, BPK Ungkap 9.261 Temuan Senilai Rp 18,19 Triliun. Tersedia: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5743m430/laporkan-ihps-i-2023-bpk-ungkap-9261-temuan-senilai-rp-1819-triliun>

Radar Bandung. 2019 Refleksi Akhir Tahun 2019, Catatan Krisis untuk PEMDA KBB. Tersedia: <https://www.radarbandung.id/2019/12/20/refleksi-akhir-tahun-2019-catatan-kritis-untuk-pemda-kbb/>

Iwa Ahmad Sugriwa. 2020. Pertama Kali, Pemkab Bandung Barat Raih Opini WTP. Tersedia: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/279995/pertama-kali-pemkab-bandung-barat-raih-opini-wtp>

Maria Elena. 2022. LHP BPK 2022: 41 Laporan Keuangan Pemda Bermasalah. Tersedia: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221007/9/1585234/lhp-bpk-2022-41-laporan-keuangan-pemda-bermasalah>

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tersedia: <https://bandungbaratkab.go.id/>

Warta Pemeriksa. 2023. Serahkan IHPS I 2023, BPK Ungkap 9.261 Temuan Senilai Rp 18,19 Triliun. Tersedia: <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=45507>

Warta Pemeriksa. 2024. IHPS I 2023 Ungkap 1.004 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern. Tersedia: <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=46008>

Warta Pemeriksa. 2024. Sampaikan IHPS I 2023, Ini Detail Temuan yang Diungkap BPK. Tersedia: <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=45927>

LAKIP Kabupaten Bandung Barat. Tersedia: <https://bandungbaratkab.go.id/>